

**REVIU PERJANJIAN KINERJA
DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I TANJUNG PERAK
TAHUN 2025**



**DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I TANJUNG PERAK
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
JUNI, 2025**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun, perlu dilakukan Reviu Perjanjian Kinerja karena adanya pergantian pimpinan, perubahan atau penambahan anggaran pada DIPA kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak dalam rangka buka blokir pada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya

untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Reviu Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Juni 2025
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I
Tanjung Perak



Dr. H. Hanto, M.H., M.Mar.E
19720623 199803 1 002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I TANJUNG PERAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Hartanto, M.H.,M.Mar.E**
Jabatan : Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Muhammad Masyud**
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Pihak Pertama
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I
Tanjung Perak

Muhammad Masyud
NIP. 19700622 199803 1 001



Dr. Hartanto, M.H.,M.Mar.E
NIP. 19720623 199803 1 002

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I TANJUNG PERAK**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK.1	Meningkatnya Dukungan Bidang Kenavigasian, Perkapalan dan Kepelautan, serta Penjagaan Laut dan Pantai terhadap Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	IKK.1	Persentase Kecukupan SBNP	%	78
		IKK.2	Persentase Keandalan SBNP	%	94,68
		IKK.3	Persentase Kecukupan Telekomunikasi Pelayaran	%	100
		IKK.4	Persentase Keandalan Telekomunikasi Pelayaran	%	77
		IKK.5	Tingkat Keandalan Kapal Kenavigasian	%	70
		IKK.6	Persentase Penyediaan Peralatan Pendukung Operasional bidang Kenavigasian	%	85
		IKK.7	Persentase Keandalan Peralatan Pendukung Operasional Bidang Kenavigasian	%	80
		IKK.8	Persentase Penyediaan Peralatan Pendukung Operasional Bidang Lainnya	%	100
		IKK.9	Persentase Keandalan Peralatan Pendukung Operasional Bidang Lainnya	%	75
		IKK.10	Persentase Terpenuhinya Bangunan Operasional bidang Kenavigasian	%	90
		IKK.11	Persentase Keandalan Bangunan Operasional bidang Kenavigasian	%	100
		IKK.12	Persentase Terpenuhinya Bangunan Operasional bidang Lainnya	%	100
		IKK.13	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pendukung bidang Kenavigasian	%	100
		IKK.14	Persentase Keandalan Fasilitas Pendukung bidang kenavigasian	%	80
		IKK.15	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pendukung Bidang Lainnya	%	100
		IKK.16	Persentase Keandalan Fasilitas Pendukung Bidang Lainnya	%	80
		IKK.17	Persentase Pelaksanaan Survey Alur Pelayaran pada Pelabuhan	%	61

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK.2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Unit Kerja dalam mendukung Transportasi Laut	IKK.20	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	100
SK.3	Meningkatnya Dukungan Manajemen terhadap Kualitas Tata Kelola Unit Kerja yang Baik	IKK.21	Persentase Pelaksanaan Layanan Perkantoran	%	100
SK.4	Meningkatnya Dukungan Teknis terhadap Kualitas Tata Kelola Unit Kerja yang Baik	IKK.22	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	100
		IKK.23	Terlaksananya Monev dan Pelaporan	%	100
		IKK.24	Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	100
		IKK.26	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak	%	100
		IKK.27	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	97,18

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut | Rp 40.363.437.000,- |
| 2. Penunjang Teknis Transportasi Laut | Rp 155.732.000,- |
| 3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut | Rp 47.060.833.000,- |

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Surabaya, Juni 2025
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I
Tanjung Perak

Muhammad Masyud
NIP. 19700622 199803 1 001



Dr. Haranto, M.H., M.Mar.E
NIP. 19700623 199803 1 002